

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja organisasi dan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah, diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang,—(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
6. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. memberi pedoman kepada aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan dalam:
 1. melakukan pemberkasan Arsip Dinamis berdasarkan subyek;
 2. menjamin informasi Arsip dari kegiatan yang sama kegiatan dan/atau masalahnya akan mengelompok ke dalam satu berkas;
 3. mengatur penyimpanan Arsip secara logis sistematis dan konsisten;
 4. mendukung secara langsung penyusutan Arsip; dan
 5. pengendalian dan membantu dalam mempercepat penemuan kembali Arsip.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
 - b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu; dan
 - e. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.

BAB II KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah merupakan bagian dari tata kearsipan Pemerintah Daerah.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (4) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip menggunakan kode berupa angka.
- (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataaan, penyusutan dan penemuan kembali Arsip.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 November 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR
74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara A.
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 74 TAHUN 2023,TANGGAL 3 NOVEMBER 2023

TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

000	UMUM	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1		000.1.1 Telekomunikasi
		000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
		000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
		000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
		000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
		000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)
		000.1.5 Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)
		000.1.6 Penyediaan Konsumsi
		000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
		000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
		000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
		000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
		000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
		000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
		000.1.8.2 Penghijauan
		000.1.8.3 Perbaikan Gedung
		000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
		000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
		000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
		000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
		000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
		000.1.9.2 Pemasangan
		000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
		000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
		000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
		000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
		000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
000.2		PERLENGKAPAN
000.2.1		Inventarisasi dan Penyimpanan
		000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2		Pemeliharaan peralatan kantor
		000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
		000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3		Distribusi
		000.2.3.1 Barang habis pakai
		000.2.3.2 Barang milik daerah
000.2.4		Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang

		dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)
000.2.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
000.3	PENGADAAN	
000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	
000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	
000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)	
000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	
000.4	PERPUSTAKAAN	
000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka <ul style="list-style-type: none"> 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog 	
000.4.3	Koleksi Pustaka <ul style="list-style-type: none"> 000.4.3.1 Pembelian 000.4.3.2 Hibah 000.4.3.3 Hadiah 000.4.3.4 Tukar Menukar 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR 000.4.3.6 Terbitan Internal 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk) 	
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	
000.4.6	Layanan Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> 000.4.6.1 Keanggotaan 000.4.6.2 Peminjaman 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca 	
000.4.7	Kerjasama Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> 000.4.7.1 MoU 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional 	
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> 000.4.8.1 Pengembangan situs web 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia 	

		000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
		000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
	000.4.10	Konservasi	
		000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
	000.4.12	Transformasi Digital	
	000.4.13	Kurasi Digital	
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
		000.4.14.1	Perpustakaan Umum
		000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
		000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
		000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5	KEARSIPAN		
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
		000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
		000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
		000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
		000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
		000.5.2.5	Data Base Arsiparis
		000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
		000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
		000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
		000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
		000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
		000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
		000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
		000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
		000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
		000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)

	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)	
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	
000.5.6	Penyusutan Arsip	
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	
000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis	
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkip)
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

		000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
		000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
		000.5.9.7	Preservasi Kuratif
		000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
		000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	
	000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	
	000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal 000.5.15.3 Sanksi 	
000.6	PERSANDIAN		
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	000.6.2	Pengamanan persandian <ul style="list-style-type: none"> 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan 	
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi <ul style="list-style-type: none"> 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian 000.6.3.3 Pelaksanaan 000.6.3.4 Pelaporan 	
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian <ul style="list-style-type: none"> 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 000.6.4.2 Jaring Komunikasi 	
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik <ul style="list-style-type: none"> 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik 000.6.5.7 Pelaporan 	
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang <ul style="list-style-type: none"> 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi 000.7.1.2 Musrenbang Nasional 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan 000.7.1.6 Musrenbang Desa 	
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 	

		000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
		000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
		000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
		000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
		000.7.2.6	Program kerja tahunan
		000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
		000.7.2.8	Laporan Berkala
		000.7.2.9	Laporan Insidensial
		000.7.2.10	Evaluasi Program
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi	Perencanaan Pembangunan
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
		000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
		000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
		000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
		000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
		000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
		000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
		000.7.7.2	Pendanaan Daerah
		000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
		000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
		000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
		000.8.1.1	Pembentukan
		000.8.1.2	Pengubahan
		000.8.1.3	Pembubaran
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	
		000.8.2.1	Analisa Jabatan
		000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
	000.8.3	Ketatalaksanaan	
		000.8.3.1	Proses Bisnis
		000.8.3.2	Standar Pelayanan
		000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
		000.8.3.4	Pelayanan Publik
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	
		000.8.6.1	Budaya Kerja
		000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
		000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN		
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)	
	000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	

		000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.6.1	Data
		000.9.6.2	Statistik
		000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
		000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
		000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
		000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop
100	PEMERINTAHAN		
	100.1	OTONOMI DAERAH	
	100.1.1		Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.1.2		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
	100.1.3		Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.4		Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.4.1		Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
	100.1.4.2		Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
	100.1.4.3		Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
	100.1.4.4		Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
	100.1.4.5		Assosiasi Daerah
	100.1.5		Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.5.1		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	100.1.5.2		Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
	100.1.5.3		Pengembangan Kapasitas Daerah
	100.1.6		LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
	100.2	PEMERINTAHAN UMUM	
	100.2.1		Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.2.2		Dekonsentrasi dan Kerjasama
	100.2.2.1		Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
	100.2.2.2		Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
	100.2.2.3		Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
	100.2.2.4		Fasilitasi Kecamatan
	100.2.2.5		Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3		Wilayah Administrasi dan Perbatasan
	100.2.3.1		Toponimi dan Data Wilayah
	100.2.3.2		Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara

		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM		
	100.3.1	Program Legislasi	
	100.3.1.1	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.1.2	100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
	100.3.3.1	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
	100.3.4.1	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5	Surat Perintah	
	100.3.5.1	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	100.3.7.2	Luar Negeri
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
	100.3.11.1	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	100.3.11.6	Sengketa Adat
	100.3.12	Perijinan	
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	100.3.13.1	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	100.3.13.5	Hak Merk
	100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	

	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	
200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	
200.1.2.3	Bela Negara	
200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	
200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	
200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	
200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	
200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	
200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
200.1.4.1	Ketahanan Seni	
200.1.4.2	Ketahanan Budaya	
200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	
200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	
200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	
200.1.4.6	Fasilitasi	
200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	
200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	
200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	
200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	
200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	
200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	
200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	
200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	
200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	
200.1.5.6	Pemerintah Daerah	
200.1.5.7	Database Parpol	
200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	
200.1.5.9	Pemilihan Umum	
200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	
200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	
200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	
200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	
200.2	PEMILU	
200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	
200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	

	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja <ul style="list-style-type: none"> 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4	Perlindungan Masyarakat
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN <ul style="list-style-type: none"> 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan <ul style="list-style-type: none"> 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan 300.2.2.4 Permasarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan 300.2.2.6 Registrasi BEACON 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi 300.2.8 Operasi Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) 300.2.8.3 Registrasi BEACON 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi 300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 300.2.12.1 Laporan Harian 300.2.12.2 Laporan Bulanan 300.2.12.3 Laporan Tahunan 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya

	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	

		400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
		400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
		400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
		400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
		400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
		400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
		400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	400.2.1	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2	400.2.2.1	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2	400.2.2.2	Data gender
	400.2.3	400.2.3.1	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	400.2.3.2	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3	400.2.3.3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3	400.2.3.4	Data perlindungan perempuan
	400.2.3	400.2.3.5	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	400.2.3.6	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
	400.2.3	400.2.3.7	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
	400.2.4	400.2.4.1	Analisis dan penyajian informasi gender
	400.2.4	400.2.4.2	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4	400.2.4.3	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
	400.2.4	400.2.4.4	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	400.2.4	400.2.4.5	Data perlindungan anak
	400.2.4	400.2.4.6	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.4	400.2.4.7	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
	400.2.4	400.2.4.8	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
	400.2.5	400.2.5.1	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
	400.2.5	400.2.5.2	Pemenuhan Hak Anak
	400.2.5	400.2.5.3	Data Klaster Hak Anak
	400.2.5	400.2.5.4	Data tumbuh kembang anak
	400.2.5	400.2.5.5	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.5	400.2.5.6	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
	400.2.6	400.2.5.7	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
	400.2.6	400.2.5.8	
	400.2.6	400.2.6.1	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
	400.2.7	400.2.6.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak
	400.2.8	400.2.6.3	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3	PENDIDIKAN		
	400.3.1	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.3.2	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal

	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak
	400.3.2.4	Block Grant
400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah

		400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
		400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
		400.3.10.7	Block grant
		400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.11	Penilaian Pendidikan	
		400.3.11.1	Penilaian Akademik
		400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
		400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
	400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
		400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
		400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
	400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
		400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
		400.3.13.2	Sarana Pendidikan
		400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4	KEOLAHRAGAAN		
	400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	
		400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
		400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
		400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
		400.4.3.1	Olahraga Massal
		400.4.3.2	Olahraga Tradisional
		400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	
		400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
		400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
		400.4.4.3	Olahraga Prestasi
		400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
		400.4.5.1	Olahraga Tradisional
		400.4.5.2	Layanan Khusus
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
		400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
		400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
		400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
		400.4.7.2	Kompetisi
		400.4.7.3	IPTEK Olahraga
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
		400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
		400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
		400.4.9.1	Industri Olahraga
		400.4.9.2	Promosi Olahraga
	400.4.10	Olahraga Prestasi	
		400.4.10.1	Daerah
		400.4.10.2	Nasional
		400.4.10.3	Internasional
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
		400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
		400.4.11.2	Akkreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
		400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga

400.5	KEPEMUDAAN
400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) 400.5.2.3 Pengembangan
400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan) <ul style="list-style-type: none"> 400.5.5.1 Pengkajian 400.5.5.2 Pengembangan 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7	Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 400.5.7.1 Kelembagaan 400.5.7.2 Pengaderan 400.5.7.3 Perintisan
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan <ul style="list-style-type: none"> 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 400.5.9.1 Standardisasi 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> 400.5.10.1 Kemitraan 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda
400.6	KEBUDAYAAN
400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman <ul style="list-style-type: none"> 400.6.2.1 Registrasi Nasional 400.6.2.2 Pelindungan 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman <ul style="list-style-type: none"> 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2	Kekayaan budaya
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
	400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7	KESEHATAN	
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembentukan kesehatan primer
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akkreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanaman Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akkreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan

400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan
400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
400.7.5.3	Radiologi
400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa
400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
400.7.7.2	Imunisasi
400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung
400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang
400.7.9.1	Pengendalian malaria
400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular
400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
400.7.10.3	Penyakit kanker
400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan
400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
400.7.13	Gizi
400.7.13.1	Gizi makro
400.7.13.2	Gizi mikro
400.7.13.3	Gizi klinik dan diabetik
400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
400.7.13.5	Kewaspadaan gizi

400.7.14	Kesehatan ibu
400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
400.7.14.4	Keluarga berencana
400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak
400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga
400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
400.7.17.2	Kapasitas kerja
400.7.17.3	Lingkungan kerja
400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan
400.7.18.1	Harga obat publik
400.7.18.2	Pengadaan obat
400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan
400.7.19.1	Alat kesehatan
400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian
400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
400.7.20.2	Farmasi klinis
400.7.20.3	Farmasi Komunitas
400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian
400.7.21.1	Obat tradisional
400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
400.7.22.1	Surat keterangan
400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan
400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN

400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	
400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	
400.7.26	Kesehatan Haji	
400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	
400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	
400.7.27	Promosi Kesehatan	
400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	
400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	
400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	
400.7.27.4	Hari kesehatan	
400.7.28	Data dan Informasi	
400.7.28.1	Statistik kesehatan	
400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	
400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	
400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	
400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	
400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	
400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan	
400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	
400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.8.2	Fasilitasi	
400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	
400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	
400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	
400.8.2.4	Kasus Keagamaan	
400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	
400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	
400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	
400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	
400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	
400.9	SOSIAL	

400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak <ul style="list-style-type: none"> 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecacatan 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
400.9.3	Rehabilitasi Sosial <ul style="list-style-type: none"> 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial <ul style="list-style-type: none"> 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung 400.9.4.2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia <ul style="list-style-type: none"> 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial <ul style="list-style-type: none"> 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam <ul style="list-style-type: none"> 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial 400.9.10.4 Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial <ul style="list-style-type: none"> 400.9.11.1 Seleksi dan verifikasi 400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran 400.9.11.4 Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial <ul style="list-style-type: none"> 400.9.12.1 Ketahanan keluarga

		400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
		400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
		400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
		400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
		400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
		400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
		400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
		400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
		400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
		400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
		400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
		400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
		400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
		400.9.14.5	Bantuan Langsung
		400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
		400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
		400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
		400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
		400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
	400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
		400.10.4.1	Budaya Nusantara
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
		400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	

		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.11.2	Pertamanan	
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	
	400.11.2.2	Taman Kota	
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	
	400.11.3	Pemakaman	
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	
	400.11.3.2	Pemakaman	
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	
	400.11.4	Jalur Hijau	
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurnaan dan Tepian Air	
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
	400.11.7	Pengelolaan Data	
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk	
	400.12.2.1	Identitas Penduduk	
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.3	Pencatatan Sipil	
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pencatatan Kewarganegaraan	
	400.12.3.4	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.3.5		
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk	
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	

		400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
		400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6	Penyerasian Kependudukan	400.12.6.1	Indikator Kependudukan
		400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
		400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
		400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
		400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.13	KELUARGA BERENCANA		
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
		400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
		400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
		400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
		400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	
		400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
		400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
		400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
		400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
		400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
		400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
	400.13.7	Pengembangan Sistem	
		400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
		400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.8	Pengembangan Materi	
		400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
		400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
		400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
		400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
0	400.13.1	Analisis Sosial	
1	400.13.1	Analisis Ekonomi	
2	400.13.1	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
3	400.13.1	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
4	400.13.1	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
5	400.13.1	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
6	400.13.1	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
		400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.1 7	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
400.13.1 8	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	
400.13.1 9	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.2 0	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.2 1	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.2 2	Kesertaan keluarga berencana pria	
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
400.13.2 3	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	
400.13.2 4	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	
400.13.2 5	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	
400.13.2 6	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak	
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400.13.2 7	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400.13.2 8	Pelembagaan bina ketahanan remaja	
	400.13.28.1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
	400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
400.13.2 9	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400.13.3 0	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	

			Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
		400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
	1	400.13.3	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	2	400.13.3	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	3	400.13.3	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
	4	400.13.3	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
	5	400.13.3	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
		400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
		400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
	6	400.13.3	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
	7	400.13.3	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
	8	400.13.3	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	9	400.13.3	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	0	400.13.4	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	1	400.13.4	Advokasi dan pencitraan
	2	400.13.4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
		400.13.42.1	Promosi
		400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
		400.13.42.3	Produk media komunikasi
	3	400.13.4	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
	4	400.13.4	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
		400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
		400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

- 400.13.4 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 5

400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.4 Tenaga Lini Lapangan
 6

400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.4 Institusi Masyarakat Pedesaan
 7

400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.4 Mekanisme Operasional lini lapangan
 8

400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.4 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 9

400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.5 Pengumpulan dan pengolahan data
 0
- 400.13.5 Analisis dan evaluasi
 1

400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 400.13.5 Sistem aplikasi dan bank data
 2

400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.5 Infrastruktur teknologi informasi
 3

400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.5 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 4

400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
- 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
- 400.14.1 Keprotokolan

400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
- 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor / pejabat
- 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing

		masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	
	400.14.4.1 Kliping koran	
	400.14.4.2 Brosur/Leaflet/poster/plakat	
	400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan	
400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	
	400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah	
	400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	
	400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan	
	400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	
	400.14.5.5 Forum Kehumasan	
	400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa	
400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	
400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	
400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	
400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	
400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	
400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	
400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	
500	PEREKONOMIAN	
500.1	KETAHANAN PANGAN	
	500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	
	500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
	500.1.2.1 Ketersediaan Pangan	
	500.1.2.2 Akses Pangan	
	500.1.2.3 Kerawanan Pangan	
	500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan	
	500.1.3.1 Distribusi Pangan	
	500.1.3.2 Harga Pangan	
	500.1.3.3 Cadangan Pangan	
	500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	
	500.1.4.1 Konsumsi Pangan	
	500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan	
	500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar	
	500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	
	500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan	
	500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan	
	500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	
	500.1.7 Bimbingan Teknis	
	500.1.8 Evaluasi	
500.2	PERDAGANGAN	
	500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri	
	500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	
	500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdagangan	
	500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	
	500.2.2.4 Informasi Perusahaan	
	500.2.2.5 Pelaku Pasar	

		500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
		500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
		500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
		500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
		500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
		500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
		500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
		500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
		500.2.2.14	Informasi Pasar
		500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
		500.2.2.16	Barang Strategis
		500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
		500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
		500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
		500.2.3.4	Tata usaha
		500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
		500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
		500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
		500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
		500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
		500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
		500.2.3.11	Jasa
		500.2.3.12	Kerjasama
		500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
		500.2.3.14	Kelembagaan dan penilaian
		500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
		500.2.3.16	Pengawasan
		500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
		500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
		500.2.4.1	Pengkajian pasar
		500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
		500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
		500.2.4.4	Pengkajian pasar
		500.2.4.5	Pengembangan Pasar
		500.2.4.6	Sistem informasi
		500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
		500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
		500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
	500.2.5	Bimbingan Teknis	
	500.2.6	Evaluasi	
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
		500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
		500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
		500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
		500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi	
		500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan

		500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
		500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
		500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan	500.3.4.1	Program Pendanaan
		500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
		500.3.4.3	Urusan Permodalan
		500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
		500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
		500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
		500.3.5.2	Ekspor dan Impor
		500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
		500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
		500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
		500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
		500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
		500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
		500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
		500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
		500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
		500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
		500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
		500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
		500.3.8.2	Penelitian UKM
		500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
		500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	
		500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	500.4	KEHUTANAN
500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	500.4.2	Penyuluhan
500.4.2	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan	
	500.4.2.3	Program Penyuluhan	
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	
	500.4.2.8	Deseminasi	
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	
500.4.3	Planologi Kehutanan	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
		500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
		500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan

	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.4.3.13	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.15	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.16	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi

		500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		500.4.7.14	Perhutanan Sosial
		500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
	500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
		500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
		500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
		500.4.8.3	Diseminasi
		500.4.8.4	Gelar Teknologi
		500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.5.2	Perikanan Tangkap	
		500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
		500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
		500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
		500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
		500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
		500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
		500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
		500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
		500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
		500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
		500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
		500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
		500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
		500.5.2.14	Kenelayanan
		500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
		500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.3	Perikanan Budidaya	
		500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
		500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
		500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
		500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
		500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pemberian
		500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
		500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
		500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
		500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
		500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
		500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
		500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
		500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
		500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
		500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
		500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
		500.5.4.2	Pengembangan Produk
		500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		500.5.4.4	Industri Pengolahan
		500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil

	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya

		500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
		500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
		500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
		500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
		500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
		500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
		500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
		500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
		500.5.6.13	Sistem Pemantauan
		500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
		500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
		500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
		500.5.6.17	Penyidikan
		500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
		500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
		500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.7	Karantina Ikan	
		500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
		500.5.7.2	Penahanan
		500.5.7.3	Pengasingan
		500.5.7.4	Pengamatan
		500.5.7.5	Pengakuan
		500.5.7.6	Penolakan
		500.5.7.7	Pemusnahan
		500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
		500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
		500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
		500.5.7.11	Pemasukan Formulir
		500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
		500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
		500.5.7.14	Surat Perintah
		500.5.7.15	Rekomendasi
		500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
		500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
		500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
		500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
		500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN		
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.6.2	Perlindungan hortikultura	
		500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
		500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
		500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
		500.6.3.1	Penilaian Varietas
		500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
		500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
		500.6.4.1	Basis Data Lahan
		500.6.4.2	Pengendalian Lahan
		500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan

	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi
	500.6.12.2	Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.3	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.4	Teknologi Pengendalian Organisme
		Pengganggu Tumbuhan
		Pengelolaan Pengendalian Hama Tepatu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Hortikultura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standarasi	
	500.6.15.1	Standardisasi

	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa
	500.6.26.4	Hak Merek
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28	Pelayanan Hukum	
	500.6.28.1	Sertifikasi
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29	Karantina Pertanian	
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
	500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30	Bimbingan Teknis	
500.6.31	Evaluasi	
500.7	PETERNAKAN	
500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	

	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.3	Bimbingan Teknis
	500.7.4	Evaluasi
500.8	PERKEBUNAN	
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.8.2	Tanaman Semusim
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.4	Tanaman Tahunan
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan

		500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
		500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
		500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
		500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan		
500.8.8	Evaluasi Perkebunan		
500.9	PERINDUSTRIAN		
500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	500.9.2.1	Industri Manufaktur
		500.9.2.2	Industri Agro
		500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri	500.9.3.1	Industri Manufaktur
		500.9.3.2	Promosi Industri Agro
		500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	500.9.4.1	Industri Manufaktur
		500.9.4.2	Industri Agro
		500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual	500.9.5.1	Industri Manufaktur
		500.9.5.2	Industri Agro
		500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau	500.9.6.1	Industri Manufaktur
		500.9.6.2	Industri Agro
		500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota		
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung		
	Pengembangan Kawasan Industri		
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		
500.9.12	Standarisasi	500.9.12.1	Standar
		500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
		500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	500.9.13.1	Kebijakan Industri
		500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
		500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	500.9.14.1	Industri Hijau
		500.9.14.2	Lingkungan Hidup
		500.9.14.3	Energi

	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Pertambangan	
	500.10.2.3	Pertambangan Panas Bumi	
	500.10.2.4	Geosains	
	500.10.2.5	Pengukuran Time Electromagnetic (TDEM)	Domain
	500.10.2.6	Kelayakan Lingkungan	
	500.10.3	Penelitian Kegeologian	
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	
	500.10.3.9	Survei Geologi	
	500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
	500.10.4.4	Survei Geologi	
	500.10.4.5	Konservasi	
	500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	
	500.10.5.4	Survei Geologi	
	500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	

	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
	500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)

	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10.1	0	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.1	1	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.10.1	2	Panas Bumi
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksloitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.1	Bioenergi	
3	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.1	Aneka Energi	
4	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.1	Konservasi Energi	
5	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi

	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swablast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.1 6	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.1 7	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.1 8	Bina Usaha Ketenagalistikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero))
500.10.1 9	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechanism (CDM))
500.10.2	Sertifikasi 0	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.1	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.2	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.3	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.4	Registrasi Sertifikasi
500.10.2	Akreditasi Ketenagalistrikan 1	Akreditasi Ketenagalistrikan
500.10.2	Standarisasi Kompetensi 2	Standarisasi Kompetensi
500.10.2	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan 3	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.2	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 4	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan LIT
500.10.2	Bina Program Mineral dan Batubara 5	Bina Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara

	500.10.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.2	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
6	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.2	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
7	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan

		Kontrak Penjualan Batubara	Pertambangan
500.10.27.7	Perizinan Usaha Batubara	Pertambangan	
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Pengusahaan	
500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara		
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)		
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)		
500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)		
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara		
500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir		
500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara		
500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara		
500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara		
500.10.28	Penerimaan Negara		
500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak		
500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP		
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara		
500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)		
500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi		
500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang		
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)		
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)		
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)		

500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)
500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselemanan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)
500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)
500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)
500.10.29.17	Pengawasan Teknis
500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)
500.10.30.0	Program Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi
500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.3	Sarana Litbang	
1	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.3	Afiliasi	
2	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.3	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
3	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahannya Penelitian Energi dan kewilayahannya pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.3	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
4	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.3	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
5	500.10.35.1	Teknologi Eksplorasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.3	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
6	500.10.36.1	Energi baru terbarukan
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

- 500.11 PERHUBUNGAN
- 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
 - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
 - 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
 - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
 - 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
 - 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
 - 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
 - 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
 - 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
 - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
 - 500.11.7 Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
 - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
 - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
 - 500.11.8 Angkutan Penumpang
 - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
 - 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
 - 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
 - 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya

		bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.1 7	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.1 8	500.11.18	Manajemen lalu lintas
	500.11.18.1	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18.2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
	500.11.18.3	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
500.11.1 9	500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.2 0	500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.2 1	500.11.21	Tarif dan Keperintisan
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
500.11.2 2	500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.2 3	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

- 500.11.2 Angkutan Perkotaan
4
- 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.2 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
5
- 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.2 Dampak Transportasi Perkotaan
6
- 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
 - 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
- 500.11.2 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
7
- 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
 - 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
 - 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.2 Pengembangan Keselamatan
8
- 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
- 500.11.2 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
9
- 500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

		500.11.3	Bina Keselamatan Angkutan Umum
	0	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
		500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
	500.11.3	Audit Keselamatan	
	1	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
		500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.3	Inspeksi Keselamatan	
	2	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
		500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
		500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.3	Parkir	
	3	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
		500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
		500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	500.12.1		Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.12.2		Telekomunikasi
		500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
		500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
		500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
		500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3		Penyiaran
		500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
		500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
		500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
		500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
		500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
		500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
		500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
	500.12.5		Pengendalian Informatika
		500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
		500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
		500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
		500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
	500.12.6		e- Government
		500.12.6.1	Tata Kelola e-Government

	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e-Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Peralatan Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data	
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi

		500.12.1	Pusat Kerjasama
	7		500.12.17.1 Kerja Sama daerah
			500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
	500.12.1	8	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
			500.12.18.1 Pelayanan Informasi
			500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
			500.12.18.3 Bimbingan Teknis
	500.12.1	9	Evaluasi
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
		500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
		500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
		500.13.2.3	Industri Pariwisata
		500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
		500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
		500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
		500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
		500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
		500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
		500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	
		500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
		500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
		500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK		
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	
		500.14.2.1	Perencanaan
		500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah

		kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	Perencanaan
	500.14.3.1	Persiapan
	500.14.3.2	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)
	500.14.3.3	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.3.4	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
	500.14.3.5	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	KonsolidasiI Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
500.15	KETENAGAKERJAAN	
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi

	500.15.3.2	Pengembangan Kompetensi	Standarisasi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Ketenagakerjaan	Pelatihan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Produktivitas dan Kewirausahaan	Pelatihan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Ketransmigrasian	Pelatihan
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja		
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan		
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	
500.15.6	Bina Pemagangan		
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan		
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja		
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	
	500.15.8.3	Bursa Kerja	
	500.15.8.4	Analisis Jabatan	
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		
	500.15.9.1	Antar Kerja	
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal		
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	
500.15.11	Standardisasi Profesi		
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi		
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	

		500.15.12.2	Perjanjian Kerja
		500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
		500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.1	3	Kelembagaan Industrial	dan Pemasyarakatan Hubungan
		500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
		500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
		500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.1	4	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Hubungan
		500.15.14.1	Pengupahan
		500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.1	5	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	Hubungan
		500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.1	6	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Hubungan
		500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
		500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
		500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.1	7	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	Hubungan
		500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
		500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
		500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
		500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.1	8	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Hubungan
		500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
		500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
		500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
		500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
		500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.1	9	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan	Hubungan
500.15.2	0	Bina Penegakan Hukum	Hubungan
		500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
		500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
		500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.2	1	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Hubungan
		500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
		500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
		500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3

		500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.2	2	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
		500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16	PENANAMAN MODAL		
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal	
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur	
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi	
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi	
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	
	500.16.4.4	Promosi Sektoral	
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional	
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	
	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	

		500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
500.17	PERTANAHAN		
500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan		
500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah		
500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan		
500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan		
500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian		
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah		
500.17.3.1	Penatagunaan Tanah		
500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik		
500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah		
500.17.4	Sengketa Tanah		
500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa		
500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian		
500.18	TRANSMIGRASI		
500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi		
500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah		
500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah		
500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan		
500.18.2.4	Advokasi Pertanahan		
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi		
500.18.3.1	Penyiapan Lahan		
500.18.3.2	Penyiapan Sarana		
500.18.3.3	Penyiapan Prasarana		
500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman		
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi		
500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi		
500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan		
500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan		
500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi		
500.18.5	Partisipasi Masyarakat		
500.18.5.1	Promosi dan Motivasi		
500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan		
500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah		
500.18.5.4	Pelayanan Investasi		
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		
500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan		
500.18.6.2	Bina Sistem Informasi		
500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan		
500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat		
500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan		
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat		
500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan		
500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya		
500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan		
500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi		
500.18.8	Pengembangan Usaha		
500.18.8.1	Kewirausahaan		
500.18.8.2	Produksi		
500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran		
500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan		

	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.1	Penyerasian Lingkungan	
0	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	
600.1	PEKERJAAN UMUM	
600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air	
600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	
600.1.2.2	Kelembagaan	
600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	
600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	
600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	
600.1.3.2	Manajemen Mutu	
600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	
600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	
600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	
600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	
600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	
600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	
600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	
600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	
600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	
600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	

	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis

		600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
		600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
		600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
		600.1.17.5	Kelembagaan
		600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
	600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi
600.2			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600.2.1			Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.2.2			Perencanaan Pembiayaan Perumahan
	600.2.2.1		Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2		Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3		Kemitraan
600.2.3			Pola Pembiayaan Perumahan
	600.2.3.1		Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2		Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3		Pola Investasi Perumahan
600.2.4			Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.1		Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2		Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3		Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4		Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5		Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5			Perencanaan Penyediaan Perumahan
	600.2.5.1		Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2		Analisa Teknik
	600.2.5.3		Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4		Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6			Penyediaan Rumah Susun
	600.2.6.1		Perencanaan Teknik
	600.2.6.2		Penyediaan
	600.2.6.3		Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4		Pengelolaan
600.2.7			Penyediaan Rumah Khusus
	600.2.7.1		Perencanaan Teknik
	600.2.7.2		Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3		Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4		Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5		Perencanaan Teknik
	600.2.7.6		Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7		Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8			Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1		Perencanaan Teknik
	600.2.8.2		Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3		Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4		Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9			Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1		Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2		Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3		Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur

		600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
		600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
		600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
		600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
		600.2.10.4	Manajemen Mutu
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
		600.2.11.1	Kelembagaan
		600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
		600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
		600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
		600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
		600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
		600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
		600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
	600.2.13	Peningkatan Jasa Konstruksi	Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa
		600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
		600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
		600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
		600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
		600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
		600.2.15.2	Pengembangan Materi
		600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
		600.2.16.1	Antar Sektor
		600.2.16.2	Antar Wilayah
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
		600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
		600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
		600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
		600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
		600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
		600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
		600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	
600.3		TATA RUANG (TATA KOTA)	
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	
	600.3.2	Perencanaan	
		600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
		600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten

		600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
		600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
		600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
		600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
		600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
		600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
		600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.4	Pemetaan	
		600.3.4.1	Peta Dasar
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
		600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
		600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	LINGKUNGAN HIDUP		
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
		600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
	600.4.5	Dampak Lingkungan	
		600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
		600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
		600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
		600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
		600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
		600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
		600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
		600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
		600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
		600.4.8.1	Pengembangan
		600.4.8.2	Pemanfaatan
		600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
		600.4.8.4	Keamanan Hayati
		600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
		600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
		600.4.9.2	Rawa
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
		600.4.10.1	Perangkat mitigasi
		600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
		600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
		600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	

	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
600.4.12	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
	600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemeliharaan Kontaminasi
600.4.15	600.4.15	Pengelolaan Sampah
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	600.4.19	Komunikasi Lingkungan
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25		Standarisasi dan teknologi

		600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
		600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
		600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
		600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
		600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN		
700.1	PENGAWASAN INTERNAL		
	700.1.1	Rencana Pengawasan	
		700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
		700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
		700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
		700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
		700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
		700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
		700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
		700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
		700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
		700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
		700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
		700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
		700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
		700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN		
800.1	SUMBER DAYA MANUSIA		
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
		800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
		800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
		800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
		800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)

	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)	
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)	
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN	
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	
	800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	
	800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)	
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	
	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiu ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	
	800.1.6.2	Disiplin	
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)	
	800.1.7	Bantuan Hukum	

800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai
1	Status Kepegawaian
2	Kedudukan Kepegawaian
3	Keberatan Pegawai
4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian
800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiu ASN
800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai
800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
800.1.11.2	Cuti Sakit
800.1.11.3	Cuti Bersalin
800.1.11.4	Cuti Tahunan
800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
800.1.11.6	Cuti Besar
800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai
800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
800.1.12.3	Tabungan Perumahan
800.1.12.4	Bantuan Sosial
800.1.12.5	Pakaian Dinas
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan
800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
800.1.13.4	Sekretaris Daerah

		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14	Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
	800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
		800.2.2.4	Modul-modul diklat
		800.2.2.5	Panduan fasilitator
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3		Widyaiswara
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4		Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5		Alumni
900			KEUANGAN
900.1			KEUANGAN DAERAH
	900.1.1		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)
		900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
		900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
		900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
		900.1.1.4	
	900.1.2		Penyusunan Anggaran
		900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)

	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
900.1.14.1		Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)
900.1.14.2		Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)
900.1.14.3		Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
900.1.14.4		Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
900.1.14.5		Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
900.1.15	Pelaksanaan Daerah	Dan Pertanggungjawaban Keuangan
900.1.15.1		Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.2		Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan

- 900.1.15.3 kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah)
- 900.1.15.4 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah) Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah)
- 900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sister informasi pengelolaan keuangan daerah)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH